

STRATEGI PENGGUNAAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN INKLUSI BAGI TUNA GRAHITA

Arini Afiaty Dewi¹, Syifa Yunita², Tina Dwi Sri Martiani³, Sastra Wijaya⁴
ariniafiatydewi@gmail.com¹, yunitasifa0@gmail.com², tina34496@gmail.com³,
sastrawijaya0306@gmail.com⁴

Universitas Primagraha

ABSTRAK

Abstrak: Pendidikan inklusif menjadi sorotan utama dalam memfasilitasi perkembangan optimal bagi tuna grahita. Penelitian ini mengusulkan strategi efektif dalam pemanfaatan media dalam konteks pendidikan inklusif bagi mereka. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi penggunaan media interaktif, kurikulum adaptif, serta pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar bagi siswa tuna grahita. Hasilnya menyoroti pentingnya integrasi teknologi dan pendekatan pedagogis yang sesuai guna mendukung pendidikan inklusif yang lebih holistik dan efektif bagi mereka.

Kata Kunci: pendidikan inklusi bagi tuna grahita.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Bunyi ayat ini sejalan dengan deklarasi Salamanca (salamanca declaration) pada tahun 1994 tentang pendidikan untuk semua (education for All). Dua gagasan tersebut memberi konsekuensi bahwa semua anak tanpa kecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau sering juga dikenal dengan sebutan anak luar biasa adalah mereka yang mengalami penyimpang-an atau perbedaan secara signifikan dari keadaan orang pada umumnya (rata-rata), sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus, supaya dapat mengembangkan potensinya secara optimal (Cullata, et.al.2003) Di antara mereka, ada yang mengalami penyimpangan pada aspek fisik-motorik, intelektual, sosial dan atau emosi. Tunagrahita merupakan salah satu jenis dari kelompok anak berkebutuhan khusus. Mereka mengalami hambatan atau keterbelakangan pada fungsi intelektual secara signifikan, sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang khusus (Friend, Marilyn, 2005; Abdurrahman dan Sudjadi, 1994; Hardman, et.al., 1990). Secara operasional, ada dua kriteria utama yang sering dipakai oleh para ahli untuk menetapkan seseorang tergolong tunagrahita yaitu (1) kemampuan intelektual di bawah rata-rata secara signifikan, yakni IQ di bawah 70 pada skala Wechsler, dan (2) rendahnya perilaku penyesuaian, baik terhadap tuntutan dirinya maupun lingkungan sosial, dan (3) fenomena-nya terjadi pada periode perkembangan yaitu usia di bawah 16 atau 18 tahun Tunagrahita adalah mereka yang mengalami hambatan atau keterbelakangan fungsi kecerdasan atau intelektual secara signifikan, sehingga membutuhkan suatu layanan pendidikan yang khusus untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Secara operasional, ada tiga kriteria utama yang sering dipakai oleh para ahli untuk menetapkan seseorang tergolong kedalam kelompok anak tunagrahita, yaitu (1) kemampuan intelektual di bawah rata-rata, secara signifikan, (2) rendahnya perilaku penyesuaian diri, (3) terjadi pada usia perkembangan (Turnbull, 2004; Friend, 2005; Eggen & Kauchak, 2004; woolfolk, 2004). Kriteria pertama,

tentang kemampuan intelektual di bawah rata-rata umumnya di identifikasikan oleh adanya skor IQ yang menyimpang 2 simpangan baku di bawah rata-rata, yaitu sekitar angka 70 atau 68. Dengan demikian, seseorang dikatakan terbelakang mental apabila memiliki skor IQ dibawah 70 atau 68. Kriteria kedua, tentang hambatan prilaku adaptif biasanya menunjuk kepada rendahnya kemandirian dan atau tanggung jawab sosial seorang anak di-banding keadaan usianya dan atau budaya kelompoknya. Misalnya hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dasar seperti membaca, menulis, aritmatik, konsep-konsep dasar bidang studi, keterbatasan dalam melakukan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, juga ketidakmampuan dalam menjalankan tugas atau peran-peran sosial yang dituntut oleh kelompok atau lingkungan sosialnya. Kriteria ketiga, mengatakan bahwa gejala-gejala eter-belajangan mental seperti yang disebutkan di atas harus terjadi dan teramat ketika anak berada dalam masa perkembangan yaitu usia 18 tahun kebawah. Dalam perspektif pendidikan, keterbelakangan mental sering dikatagorikan ke dalam empat kelompok (Friend, 2005) yaitu keterbelakangan (1) ringan, (2) sedang, (3) berat dan (4) sangat berat. Tunagrahita Ringan adalah mereka yang memiliki IQ berkisar antara 55 sampai dengan 69. Mereka umumnya lancar berbicara tetapi perbendaharaan katanya terbatas. Mereka mengalami kesukaran berpikir abstrak, tetapi masih dimungkinkan untuk mengikuti pelajaran akademik walaupun dalam tingkatan yang rendah (sederhana). Sebagian dari mereka dapat mencapai kecerdasan setingkat anak usia 12 tahun, ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Secara umum, kecerdasan mereka paling tinggi dapat mencapai kemampuan setingkat anak usia 12 tahun. Tunagrahita Sedang. Mereka memiliki IQ berkisar 40-54. Secara umum, mereka hampir tidak bisa mempelajari materi-materi akademik (membaca, menulis dan berhitung). Mereka umumnya belajar secara membeo, yaitu mempelajari dan menguasi sesuatu tanpa akan. Perkembangan bahasanya lebih terbatas dibanding anak tunagrahita ringan. Dapat membedakan bahaya dan tidak bahaya, tetapi mereka hampir selalu bergantung pada petunjuk dan perlindungan orang lain. Mereka masih dapat dilatih kemampuan untuk memelihara dirinya sendiri, dan beberapa pekerjaan yang memiliki nilai ekonomik. Kecerdasan mereka maksimum berkembang serta anak usia 7 tahun. Tunagrahita berat. Mereka memiliki IQ berkisar 25-39. Hampir seluruh waktu dan aktivitas bergantung kepada pertolongan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara dirinya sendiri, seperti makan, berpakaian, mandi dan lain-lainnya. Pada umumnya juga tidak dapat membedakan baya dan tidak bahaya. Mereka juga tidak diharapkan dapat berpatisipasi dalam lingkungan sekitarnya. Tunagrahita Sangat Berat. Mereka memiliki IQ kurang dari 25. Kondisi mereka umumnya hampir sama seperti terbelakang mental berat. Dalam literatur, memang mereka yang terbelakang mental berat dan sangat berat sering diilustrasikan secara bersama. Perkembangan maksimum kecerdasan mereka setara dengan anak normal usia 3 atau 4 tahun. Secara umum ada dua pendekatan atau model dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunagrahita. Pertama model terpisah (segregasi) dan kedua model terintegrasi (mainstreaming). Model segregatif adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan, di mana anak-anak tunagrahita memperoleh layanan pendidikan di lembaga tersendiri (khusus) yang terpisah dan anak-anak lainnya. Model ini sering disebut dengan istilah Sekolah Luar Biasa. Model terintegrasi (mainstreaming) adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan dimana anak-anak tunagrahita memperoleh layanan pendidikan secara terintegrasi (bersama-sama) dengan siswa lainnya di sekolah umum (sekolah regular). Pendidikan inklusif merupakan salah satu perwujudan pendekatan yang mainstreaming. Pada dasarnya sulit untuk menemukan lembaga pendidikan yang benar-benar segregasi dan yang benar-benar main-streaming. Oleh karena itu, secara lebih rinci penyelenggaraan pendidikan bagi siswa tunagrahita dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut (Gallegher, 1986, Friend, 2005):

pertama, general education (full Inclusion). Pada model ini siswa tunagrahita memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran di kelas-kelas reguler secara bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Siswa-siswi tunagrahita mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kurikulum, materi, proses serta evaluasi dirancang dan dijalankan sesuai dengan kondisi anak. Kedua, resource class. Dalam model siswa tunagrahita belajar pada sekolah reguler terdekat dimana anak tinggal. Kurang lebih 50% waktu belajar diberikan (dilakukan) di kelas khusus secara terpisah dari anak-anak lainnya. Lima puluh persen waktu lainnya digunakan untuk belajar secara bergabung atau bersama dengan siswa lainnya baik di dalam maupun di luar kelas. Ketiga, separate class (Special Class). Siswa terdaftar dalam suatu sekolah umum (regular), tetapi sebagian besar waktu belajar digunakan di kelas khusus yang sengaja disediakan untuk mereka. Program yang disajikan biasanya berkenaan dengan pengembangan materi atau keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan. Program ini memungkinkan anak tunagrahita untuk sewaktu-waktu ikut serta ke dalam kelas reguler pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan minat. Keempat, separate school (Special school). Program ini berbentuk lembaga atau sekolah yang secara khusus diperuntukkan bagi anak tunagrahita. ini merupakan bentuk sekolah atau lingkungan pendidikan yang benar-benar terpisah dari sekolah umum (reguler). Program ini dapat dilaksanakan dengan sistem harian (day school) dimana anak-anak tetap tinggal di rumah orang tuanya dan pergi ke sekolah setiap hari, atau sistem asrama dimana anak tinggal di asrama yang merupakan bagian terpadu dan sekolah. Kelima, home or hospital. Ini adalah bentuk alternatif pendidikan untuk anak tunagrahita yang menjalani perawatan kesehatan di rumah atau di rumah sakit. Siswa tunagrahita yang mengalami problem kesehatan yang kronik biasanya harus dirawat dalam kurun waktu yang relatif lama, baik di rumah maupun di rumah sakit. Untuk kondisi seperti ini, maka pembelajaran biasanya dilangsungkan di tempat dimana anak harus dirawat.

A. Pendidikan Inklusif untuk Tunagrahita Ditinjau dari makna kata, inklusi (inclusion) berarti termasuk di dalamnya atau merupakan bagian dari keseluruhan. Inklusif (dari kata inclusive) merupakan kata sifat dari inklusi, yang berarti bersifat terbuka, artinya semua orang dapat bergabung untuk menjadi bagian dari keseluruhan. Pendidikan inklusif (inclusive education) secara umum dimaknai sebagai suatu filosofi dan system penyelenggaraan pendidikan dimana semua anak dengan berbagai kondisi dapat mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama. Sekolah yang menerapkan sistem inklusif memberi kesempatan atau membuka diri kepada semua anak untuk mengikuti pendidikan, tanpa membedakan latar belakang agama, social, ekonomi, budaya, suku bangsa dan juga kemampuan. Dalam konteks pendidikan anak tunagrahita, maka pendidikan inklusif adalah suatu filosofi atau system penyelenggaraan pendidikan, dimana anak-anak tunagrahita mengikuti kegiatan pendidikan dan atau pembelajaran di sekolah-sekolah regular (umum) secara bersama dengan anak-anak lainnya. Anak tunagrahita mendaftarkan diri ke sekolah regular yang dekat dengan tempat tinggalnya. Mereka belajar di kelas-kelas regular secara bersama dengan anak-anak lainnya, tetapi mereka memperoleh layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Ada tiga karakteristik utama dari pelaksanaan pendidikan inklusif (Eggen & Kauchak, 2004): (1) anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah reguler (umum), (2) anak berkebutuhan khusus ditempatkan pada kelas yang sesuai dengan umurnya, dan (3) ketika pembelajaran di kelas, anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Sejalan dengan Eggen & Kauchak, Turnbull et.al. (2004) menyebutkan ada empat aspek yang menjadi karakteristik dari pendidikan inklusif yaitu (1) anak mengikuti pendidikan di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, sebagaimana anak-anak umumnya juga

melakukan hal tersebut, (2) jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas reguler bersifat proporsional, sebagai-mana porsi anak berkebutuhan khusus dalam populasi yang sesungguhnya di masyarakat, (3) pelaksanaan pembelajaran di kelas menggabungkan strategi pembelajaran umum dan layanan pendidikan yang khusus, (4) anak berkebutuhan khusus di tempatkan pada kelas yang sesuai dengan usianya.Tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang khusus supaya dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kurikulum dan proses pembelajaran perlu dirancang khusus supaya cocok dengan kebutuhan mereka, sehingga pada gilirannya mampu memberdayakan mereka untuk menjadi manusia yang mandiri. Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak tunagrahita telah menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia. Hal ini tampak dari bunyi pasal 5 ayat 2 UU No. 20/2003 yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sangat sedikit anak-anak tunagrahita dan anak berkebutuhan khusus yang telah mendapat kesempatan pendidikan. Data yang bersumber dari BPS menyebutkan bahwa proyeksi jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia tahun 2008 adalah 1.504.000 orang, dan 322 ribu di antaranya adalah anak berkebutuhan khusus usia sekolah (5-18 thn). Selanjutnya, data direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) menunjukkan bahwa saat ini jumlah anak berkebutuhan khusus yang telah mendapat pendidikan di sekolah luar biasa adalah 66.610 anak. Dengan demikian, baru sekitar 20% anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah (termasuk di dalamnya tunagrahita) yang telah mendapat kesempatan mengikuti pendidikan. Kecilnya akses pendidikan untuk anak tunagrahita dan anak berkebutuhan khusus pada umumnya, disebabkan karena masih sedikitnya jumlah sekolah luar biasa (SLB) di Indonesia. Data Depdiknas menyebutkan bahwa saat ini tercatat hanya ada 1569 SLB di seluruh Indonesia dari mulai jenjang TK sampai dengan sekolah menengah. Dari jumlah tersebut hanya 302 sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah negeri). Ada dua persoalan mendasar yang menyebabkan lambannya pengembangan sekolah luar biasa, yaitu (1) pendirian SLB perlu biaya investasi yang mahal, (2) di sisi lain keberadaan anak berkebutuhan khusus tidak terkonsentrasi di suatu wilayah dalam jumlah yang banyak, tetapi tersebar di berbagai lokasi dan pelosok. Kondisi ini menyebabkan semakin tidak ekonomisnya pendirian SLB.Untuk mengatasi persoalan tersebut, saat ini ada satu pemikiran yang dianggap merupakan terobosan yang efektif untuk menanggulangi masalah kesempatan pendidikan bagi anak-anak tunagrahita, yakni konsep "pendidikan inklusif". Pendidikan inklusif adalah suatu filosofi dan juga strategi dalam pendidikan, dimana anak-anak dengan berbagai kondisi (termasuk anak berkebutuhan khusus) dapat mengikuti pendidikan secara bersama-sama di sekolah reguler (sekolah umum). Pemikiran ini menjanjikan adanya peningkatan kesempatan pendidikan yang signifikan bagi siswa tunagrahita, karena pendidikan inklusif membuka peluang kepada siswa tunagrahita untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler (sekolah umum) mana saja yang dekat dengan tempat tinggalnya.Pendidikan inklusif telah mulai digulirkan oleh pemerintah. Sejumlah sekolah reguler telah ditetapkan sebagai sekolah inklusif baik negeri maupun swasta. Di DKI Jakarta misalnya, saat ini tercatat ada 59 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusif, yang meliputi sekolah dasar, SMP, SMA dan SMK. Sekolah-sekolah tersebut disamping menjalankan misinya memberi layanan pendidikan kepada siswa "umum", mereka juga menerima dan melayani pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di Jawa Barat tercatat ada 189 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusif, dan 140 di antaranya adalah sekolah dasar.Pendidikan inklusif sudah berjalan, tetapi ada sejumlah permasalahan mendasar yang ditemukan di lapangan. Hasil studi kasus yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif untuk siswa tunagrahita (Supena, 2008), menemukan adanya beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di antaranya adalah menyangkut kebijakan yang belum kokoh, persepsi dan komitmen masyarakat yang belum merata, ketersediaan SDM yang belum memadai, serta sistem kurikulum dan pembelajaran yang belum kondusif terhadap pendidikan inklusif. Terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, ada tiga permasalahan utama yang dihadapi yaitu (1) bagaimana model kurikulum dan rencana pembelajaran dalam konteks pendidikan inklusif? (2) bagaimana model pelaksanaan proses pembelajaran dalam konteks pendidikan inklusif? dan (3) bagaimana model pelaksanaan evaluasi pembelajaran dalam konteks pendidikan inklusif? Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menjawab tiga permasalahan tersebut. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan suatu model pelaksanaan pendidikan inklusif yang efektif untuk siswa tunagrahita di sekolah dasar yang merujuk kepada tiga permasalahan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian untuk pengembangan atau yang sering dikenal sebagai research and development (Sugiyono, 2006). Penelitian diawali dengan pengumpulan data tentang situasi dan kondisi pelaksanaan pendidikan inklusi yang ada saat ini (existing condition), sehingga diperoleh gambaran tentang profil pelaksanaan pendidikan inklusi secara detail dan menyeluruh. Selanjutnya dirancang suatu model hipotetik tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk anak tunagrahita yang dianggap ideal. Model selanjutnya akan mengalami pengujian dan revisi pada beberapa tahap. Setelah model terbukti efektif maka model akan didesiminasi dan diimplementasi-kan dalam praktik pendidikan. Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap (3 tahun). Artikel ini merupakan laporan penelitian tahap pertama (tahun pertama). Pada tahap ini, penelitian difokuskan pada dua target utama yaitu (1) mengkaji fakta dan permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk siswa tunagrahita di sekolah dasar saat ini, (2) mengembangkan konsep model pelaksanaan pendidikan inklusif untuk siswa tunagrahita di Sekolah Dasar. Untuk mencapai dua sasaran tersebut, ada dua kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu (1) pengumpulan data, dan (2) pengembangan model. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara dan alat secara terintegrasi, yaitu wawancara, kuesioner, pengamatan, analisis dokumen, seminar, dan diskusi kelompok terbatas (focus group discussion). Sedangkan kegiatan pengembangan model dilakukan melalui kajian teori, kegiatan seminar, workshop, dan focus group discussion. Sebanyak 42 Sekolah Dasar inklusif dan 3 Sekolah Luar Biasa (SLB) telah dilibat-kan dalam penelitian ini. Sekolah-sekolah tersebut berada di empat wilayah utama yaitu DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Pandeglang dan Kabupaten Bandung. Selain itu ada 40 sekolah dasar non-inklusif yang tersebar di lima propinsi lain yang dijadikan lokasi tambahan untuk mengumpulkan data tentang sikap mereka terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu Bangka Belitung, Jambi, Aceh, Kalimantan Selatan dan Gorontalo. Sejumlah propinsi lainnya juga telah dilibatkan sebagai lokasi tambahan untuk memperkaya kajian tentang permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusif serta pemikiran dalam pengembangan program pendidikan inklusif yaitu propinsi Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Perolehan informasi pada wilayah-wilayah tersebut dilakukan melalui kegiatan seminar dan workshop yang diselenggarakan atas kerja sama Helen Keller Internasional (HKI), MCPM-AIBEP dan direktorat PSLB Depdiknas. Sumber data dalam penelitian ini meliputi guru, kepala sekolah, pengawas dan pejabatan dinas pendidikan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh mana partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan inklusi di sekolah/satuan

pendidikan?

1. Partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif belum ideal dari segi kurikulum dan pembagian tanggung jawab kerja yang menghambat pelaksanaan program pendidikan inklusif
2. Dalam partisipasi pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dengan penyampaian pendapat demi kepentingan bersama khususnya dalam kualitas maupun pelayanan terhadap anak didik dengan memperhatikan kondisi siswa
3. Partisipasi warga sekolah terhadap perencanaan program inklusif sudah baik dengan melibatkan semua pihak. Warga sekolah juga melibatkan orang tua siswa. Warga sekolah dan orang tua siswa memberikan pendapat mengenai perencanaan program, penyampaian pendapat tersebut dilakukan melalui rapat yang biasanya diadakan pada awal tahun
4. Partisipasi pengawasan dan atau pengevaluasian program pendidikan inklusif masih belum optimal karena kurikulum yang dipakai belum sesuai dengan prinsip inklusif, guru masih menonjolkan rasa kemanusiaan dan kasihan dalam memberi nilai kepada siswa. Pengevaluasian disampaikan pada rapat intern sekolah yang biasanya dilakukan pada tengah semester, atau akhir semester
5. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program inklusif yaitu kurangnya waktu GPK (Guru Pembimbing Khusus) dalam memberikan pelayanan kepada siswa, dan kekurangan dana untuk melaksanakan program inklusif. Faktor pendukung serta upaya yang dilakukan yaitu adanya partisipasi aktif dari semua pihak dalam melaksanakan program dan menangani siswa baik siswa normal maupun berkebutuhan khusus, serta semangat para guru dalam melakukan usaha untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program inklusif

Bagaimana partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan program pendidikan inklusif disekolah?

Partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan program inklusif di sekolah dapat melibatkan rapat-rapat partisipatif, survei pendapat, serta keterlibatan dalam pembentukan komite inklusi. Juga, mendengarkan masukan dari orang tua, guru, dan siswa dapat memperkuat kolaborasi dalam merancang dan mengevaluasi program inklusif

Apakah sekolah memiliki guru pendamping khusu (GPK)?

Harus nya ada karena semua yang ikut insklusif itu harus ada pendamping khusus.Pihak SD itu laporan ke kita bahwa di sekolah SD itu ada anak ABK dan nanti setelah mendapatkan laporan dari pihak SD baru kita dating ke pihak SD nya itu pun tidak langsung kita mendampingi tapi harus memeriksa dulu misalnya benar tidak anak.

Dari Hasil observasi kami di SKH NUR RABANI bahwa Partisipasi warga sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif belum ideal dari segi kurikulum dan pembagian tanggung jawab kerja yang menghambat pelaksanaan program pendidikan inklusif.Dalam partisipasi pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dengan penyampaian pendapat demi kepentingan bersama khususnya dalam kualitas maupun pelayanan terhadap anak didik dengan memperhatikan kondisi siswa.Partisipasi warga sekolah terhadap perencanaan program inklusif sudah baik dengan melibatkan semua pihak. Warga sekolah juga melibatkan orang tua siswa. Warga sekolah dan orang tua siswa memberikan pendapat mengenai perencanaan program, penyampaian pendapat tersebut dilakukan melalui rapat yang biasanya diadakan pada awal tahun.Partisipasi pengawasan atau pengevaluasian program pendidikan inklusif masih belum optimal karena kurikulum yang dipakai belum sesuai dengan prinsip inklusif, guru masih menonjolkan rasa kemanusiaan dan kasihan dalam memberi nilai kepada siswa. Pengevaluasian disampaikan pada rapat intern sekolah yang biasanya dilakukan pada tengah semester, atau akhir

semester Faktor penghambat dalam pelaksanaan program inklusif yaitu kurangnya waktu GPK (Guru Pembimbing Khusus) dalam memberikan pelayanan kepada siswa, dan kekurangan dana untuk melaksanakan program inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa Tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang khusus supaya dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kurikulum dan proses pembelajaran perlu dirancang khusus supaya cocok dengan kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif adalah suatu filosofi dan juga strategi dalam pendidikan, di mana anak-anak dengan berbagai kondisi (termasuk anak berkebutuhan khusus) dapat mengikuti pendidikan secara bersama-sama di sekolah reguler (sekolah umum). Pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi sejumlah kendala mendasar di antaranya adalah persoalan kebijakan yang belum kokoh, sikap dan komitmen berbagai pihak yang belum merata, sarana dan prasarana yang belum memadai, kendala SDM serta sistem kurikulum, pembelajaran yang belum kondusif, dan belum tersedianya suatu model pelaksanaan pendidikan inklusif yang dapat dijadikan rambu-rambu dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cullata, T., & Werts. (2003). Fundamentals of Special Education: Second Edition. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Pusat Statistik Pendidikan, badan Penelitian dan Pengembangan. (2007). Statistik Persekolah PLB 2006/2007. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Eggen, P., & Kauchak, D. (2004). Educational Psychology: Windows on Classrooms Sixth Edition International Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Erez, F., & Peled. I. (2001). Cognition and Metacognition: Evidence of Higher Thinking in Problem Solving Of Adolescents With Mental Retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 36, 83-93. Friend, M. (2005). Special Education: Contemporary Perspectives for School Professionals. New York: Pearson Education, Inc.
- Sminth, J. D. (2006). Inklusi, Sekolah Ramah Untuk Semua. Terjemahan oleh M.Sugiarmin dan MIF Baihaqi. Bandung: penerbit Nuansa.
- Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supena, A. (2008). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif bagi Siswa Tunagrahita di Sekolah Dasar Negeri Batu Tulis Bogor. Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.